**AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
PPC/CDIE/DI REPORT PROCESSING FORM**

ENTER INFORMATION ONLY IF NOT INCLUDED ON COVER OR TITLE PAGE OF DOCUMENT

1. Project/Subproject Number

497-0357

2. Contract/Grant Number

497-C-00-98-00045-00

3. Publication Date

August 12, 2003

4. Document Title/Translated Title

Implementasi Otonomi Daerah Sudah Mengarah pada Penciptaan Distorsi dan High Cost Economy (The Implementation of Regional Autonomy has Tended to Create Distortions and a High Cost Economy)(In Indonesian)

5. Author (s)

1. Ilyas Saad, SMERU Research Institute
- 2.

6. Contributing Organization (s)

Nathan/Checchi Joint Venture/PEG Project

7. Pagination

31

8. Report Number

PEG 130

9. Sponsoring A.I.D. Office

ECG, USAID/Jakarta

10. Abstract (optional - 250 word limit)

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otda (otonomi daerah) adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar bisa lebih cepat, efektif dan efisien.dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan pemda dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah. Setelah kebijakan otonomi ini berlangsung beberapa bulan, pemda propinsi dan kabupaten telah melakukan penyesuaian administratif dan struktur organisasinya dengan baik. Tetapi bidang lain, mulai terlihat adanya beberapa permasalahan yaitu antara lain; melemahnya koordinasi antara pemda propinsi dengan pemda kabupaten/kota, kualitas pelayanan tidak lebih membaik karena dinas-dinas dibentuk bukan didasarkan pada kualitas pelayanan tetapi lebih condong pada bagaimana memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD, dan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik belum bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh pemda. Dengan alasan untuk memperkuat basis keuangannya, pemda propinsi dan kabupaten disibukkan dengan berbagai usaha untuk meningkatkan PAD. Mereka menerbitkan dan menjalankan sejumlah perda dan sedang menyusun berbagai raperda (rancangan peraturan daerah) tentang pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Selain menciptakan sumber penerimaan baru juga menghidupkan kembali jenis pungutan yang pernah menimbulkan 'ekonomi biaya tinggi' dan telah dilarang oleh UU No.18,1977. Selain itu, atas desakan dari pengusaha lokal, pengaturan yang bersifat diskriminatif dan distortif juga mulai dikembangkan lagi oleh pemda. Berikut adalah ringkasan hasil studi tim SMERU tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan kecenderungan dampaknya terhadap iklim usaha di ditiga Propinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat dan Sulawesi Utara selama kurun waktu 2000-2001.

11. Subject Keywords (optional)

1. Indonesia	4. Business Climate
2. Decentralization	5.
3. Regulatory Reform	6.

12. Supplementary Notes

13. Submitting Official

C. Stuart Callison, Chief of Party

14. Telephone Number

011-62-21-520-1047

15. Today's Date

October 17, 2003

16. DOCID

17. Document Disposition

DOCRD [] INV [] DUPLICATE []

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH SUDAH MENGARAH PADA PENCIPTAAN DISTORSI DAN HIGH COST ECONOMY ¹

Oleh DR. ILYAS SAAD

Sr. Researcher, The SMERU Research Institute

I. PENDAHULUAN

Salah satu prestasi menonjol yang dicapai oleh pemda (pemerintah daerah) otonom sekarang ini adalah menerbitkan perda (peraturan daerah) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Prestasi ini merupakan mengulangan yang pernah dicapai di masa lalu. Pada tahun 1996 pemda menerbitkan berbagai perda tentang pajak, retribusi, dan pungutan lain yang jumlahnya hampir mencapai 200 jenis (CPIS, 1996). Pada waktu itu, pemda juga mengeluarkan berbagai kebijakan berupa pengaturan terhadap mekanisme perdagangan dan pasar beberapa komoditi tertentu. Beberapa contoh dari kebijakan itu adalah rayonisasi penjualan teh di Jawa Barat, monopoli perdagangan jeruk di Kalimantan Barat, pemasaran produk lokal melalui koperasi unit desa (KUD) di Nusa Tenggara Timur, dan pelarangan jual-beli biji mete gelondongan dari Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangannya, kebijakan pemda tersebut terbukti banyak menimbulkan dampak distortif. Secara langsung dan tidak langsung telah melindungi kepentingan ekonomi kelompok-kelompok tertentu dan pada gilirannya menciptakan ekonomi biaya tinggi yang mengganggu iklim usaha, memperlemah daya saing, dan menghambat perkembangan aktivitas ekonomi di daerah.

Karena itu, pemerintah pusat melakukan koreksi dengan mengeluarkan undang-undang (UU) No.18, 1997 yang membatasi jenis pajak dan retribusi daerah. Berbagai jenis pungutan dihapus dan kebijakan yang mengganggu pasar dan distribusi dihentikan. Hasil dari kebijakan tersebut berdampak positif terhadap iklim usaha, termasuk perbaikan penghasilan petani (SMERU, Desember 1999).

Untuk lebih menggairahkan kegiatan ekonomi di daerah pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22, 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25, 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena dianggap menghalangi, maka atas permintaan pemda propinsi dan kabupaten, UU No. 18, 1997 kemudian direvisi dengan dikeluarkannya UU No. 34, 2000.

¹ Paper untuk dipaparkan pada seminar PEG-USAID 'Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate' diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta 12 Agustus 2003. Paper ini merupakan ringkasan dari hasil kajian Tim SMERU tentang otonomi daerah dan iklim usaha di tiga Propinsi (Sumut, Sulut dan Jabar). Peneliti Tim SMERU yang melakukan kajian adalah Syaikhul Usman, Ilyas Saad, Vita Febriany, Nina Toyamah, Sulton Mawardi, Hudi Sartono dan Pamadi Wibowo. PEG (Partnership for Economic Growth) adalah sebuah proyek dengan dana United States Agency for International Development (USAID). Pandangan-pandangan yang tercantum dalam laporan ini berasal dari pandangan penulis dan tidak semestinya berasal dari USAID, Pemerintah Amerika Serikat ataupun Pemerintah Indonesia.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otda (otonomi daerah) adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar bisa lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan pemda dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi masuk ke daerah.

Setelah kebijakan otonomi ini berlangsung beberapa bulan, pemda propinsi dan kabupaten telah melakukan penyesuaian administratif dan struktur organisasinya dengan baik. Tetapi bidang lain, mulai terlihat adanya beberapa permasalahan yaitu antara lain; melemahnya koordinasi antara pemda propinsi dengan pemda kabupaten/kota, kualitas pelayanan tidak lebih membaik karena dinas-dinas dibentuk bukan didasarkan pada kualitas pelayanan tetapi lebih condong pada bagaimana memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD, dan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik belum bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh pemda.

Dengan alasan untuk memperkuat basis keuangannya, pemda propinsi dan kabupaten disibukkan dengan berbagai usaha untuk meningkatkan PAD. Mereka menerbitkan dan menjalankan sejumlah perda dan sedang menyusun berbagai raperda (rancangan peraturan daerah) tentang pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Selain menciptakan sumber penerimaan baru juga menghidupkan kembali jenis pungutan yang pernah menimbulkan 'ekonomi biaya tinggi' dan telah dilarang oleh UU No.18,1977. Selain itu, atas desakan dari pengusaha lokal, pengaturan yang bersifat diskriminatif dan distortif juga mulai dikembangkan lagi oleh pemda.

Berikut adalah ringkasan hasil studi tim SMERU tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dan kecenderungan dampaknya terhadap iklim usaha di ketiga Propinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat dan Sulawesi Utara selama kurun waktu 2000-2001.

2. ISU-ISU YANG MUNCUL DALAM AWAL IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

1. Regulasi Daerah Umumnya Berorientasi Pada Peningkatan PAD

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa beberapa perubahan besar bagi pemda dalam menjalankan hak otonominya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah semakin banyaknya perda yang dibuat oleh pemda. Di satu pihak, fenomena ini dapat dipandang sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan otonomi, dimana daerah memerlukan landasan hukum untuk menjalankan hak otonominya, tetapi di pihak lain, masyarakat secara umum melihat fenomena itu sebagai eksese negatif dari pelaksanaan otonomi daerah.

Masalahnya, sebagian besar perda yang dikeluarkan adalah berupa regulasi dalam rangka meningkatkan PAD, bukan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan. Tabel 1 berisi jumlah perda pungutan yang berlaku dan yang sedang dirumuskan di sembilan kabupaten di tiga propinsi lokasi penelitian tim SMERU:

Tabel 1. Jumlah Perda Pungutan Setelah Otda

Propinsi / Kabupaten	Jumlah Perda Pungutan Pada tahun 2001	Perda Pungutan Baru Setelah Otda	Raperda Pungutan Dalam Proses
Propinsi Sumatera Utara:			
Kabupaten Deli serdang	51	28	na
Kabupaten Simalungun	26	0	32
Kabupaten Karo	21	0	4
Propinsi Sulawesi Utara:			
Kabupaten Minahasa	18	10	89
Kabupaten Bolmong	21	3	23
Kabupaten Gorontalo	32	10	75
Propinsi Jawa Barat:			
Kabupaten Cirebon	22	2	18
Kabupaten Garut	38	17	10
KabupatenCiamis	34	13	0

Sumber: Diolah dari hasil penelitian tim SMERU.

Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh pejabat teras pemda tentang banyaknya perda pungutan untuk PAD adalah bahwa:

- Kemampuan keuangan sendiri dari PAD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
- PAD adalah simbol kemandirian daerah, makin besar PAD makin menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan bisa cepat mandiri
- UU No.25,1999 hanya mengatur bagi hasil SDA (sumber daya alam) dan tentunya hanya menguntungkan daerah yang memiliki kekayaan alam. Tetapi tidak banyak berarti bagi daerah yang miskin SDA.
- Makin banyak kewenangan yang diberikan oleh pusat makin banyak memerlukan pembiayaan, sementara DAU (dana alokasi umum) dari pusat hanya cukup untuk membiayai pengeluaran rutin (birokrasi), tidak banyak bisa dilakukan dengan kegiatan pembangunan karena anggarannya sangat kecil (Tabel 2).

Tabel 2. Besarnya DAU pada TA 2001 (Rp mlr.)

Propinsi / Kabupaten	DAU yang diterima	Belanja Rutin	Surplus / defisit	Target PAD
Prop.Sulawesi Utara	75,6	198,3	- 122,7	na
Minahasa	260,0	211,3	+ 48,7	15,9
Bolmong	140,8	111,3	+ 29,5	3,8
Gorontalo	149,0	128,0	+ 21,0	5,1
Prop. Jawa Barat	552,3	1.566,4	1.014,1	1.100,0
Garut	340,4	317,0	+ 23,4	15,9
Cirebon	300,0	231,0	+ 79,0	18,0
Ciamis	n.a	n.a		13,3
Prop. Sumatera Utara	264,7	512,7	- 348,0	357,8
Deli Serdang	335,2	301,7	+ 33,5	41,0
Simalungun	260,3	n.a		51,0
Karo	92,5	93,6	- 1,1	4,1

Sumber: Diolah dari hasil penelitian tim SMERU.

- Adanya dukungan penuh dari DPRD untuk meningkatkan PAD karena gaji dan honorarium anggota tergantung pada besarnya PAD.
- 2. Perda Untuk PAD Yang Berdampak Pada Iklim Usaha dan Karena Adanya UU No.34,2000, Beberapa Jenis Pungutan Dihidupkan Kembali Setelah Dihapus oleh UU No.18/1997.**

Propinsi Sumatera Utara (Sumut)

Pada saat dikunjungi oleh Tim SMERU, Pemda Sumut terlihat masih berhati-hati dalam menerbitkan perda baru untuk pungutan. Alasannya, peraturan pemerintah (PP) dari pusat belum lengkap. Namun demikian, Pemda Sumut telah memberlakukan sejumlah perda untuk retribusi seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengaturan Pasar Grosir dan Pertokoan, dan Retribusi Kegiatan Penjualan Hasil Produksi Pertanian.

Karena Sumut kaya dengan hasil perkebunan dan perikanan, maka sasaran yang potensial untuk PAD adalah kedua sub-sektor ini. Di sub-sektor perkebunan, yang sudah menjadi sasaran pungutan pemda adalah perkebunan karet. Pihak Gapkindo (gabungan pengusaha karet Indonesia) mengemukakan bahwa pungutan dilakukan baik terhadap kegiatan inti proses perkebunan maupun terhadap kegiatan penunjang. Total pungutan pada kegiatan inti bisa mencapai antara 8-10 persen dari total biaya produksi karet petani.

Pemda Sumut juga akan mengusahakan tambahan penerimaan dari kegiatan perkebunan terutama dari perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN (PT Perkebunan Nasional) dan perkebunan swasta skala besar. Pungutan ini akan berupa sumbangan wajib khusus untuk pembangunan daerah.

Kemudian dari sub-sektor perikanan, pemda Sumut melakukan pungutan melalui minimal tiga usaha yaitu:

- a. Mengeluarkan SK Gubernur No. 511.2/000/k/2001 tentang Harga Dasar Lelang Ikan di wilayah Sumut. Sebagai balas jasa, dipungut dari nelayan retribusi sebesar 5% dari harga dasar setiap penjualan satu kg. ikan
- b. Membentuk system administrasi satu atap (samsat) kelautan untuk lebih memberdayakan Perda No.7,1999 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan dan Perda No.6, 1999 tentang retribusi pengujian kapal.
- c. Melakukan revisi terhadap Perda No.7,1999 untuk menaikkan tarif retribusi penjualan ikan dari Rp25/kg menjadi Rp75/kg.

Kabupaten Karo

Pada awal 2001, Pemda Kabupaten Karo belum banyak menerbitkan perda baru untuk PAD karena masih dalam tahap mempelajari. Namun demikian, Pemda Karo sudah memberlakukan 21 perda untuk PAD yang terdiri dari 6 pajak dan 15 retribusi. Beberapa jenis pungutan yang telah dihapus oleh UU No.18,1997 dihidupkan kembali yaitu antara lain: pajak izin penjualan minuman keras, retribusi pengurusan kartu keluarga, KTP dan perubahannya, retribusi terhadap usaha kedai nasi, kopi dan lainnya, serta retribusi untuk IMB.

Retribusi yang akan dihidupkan kembali dengan mengganti nama pungutannya adalah izin penggunaan jalan mobil barang bertonase 3.000 kg ke atas diganti nama dengan retribusi kendaraan angkutan barang yang masuk inti kota. Yang kedua adalah retribusi pangkalan yang diubah menjadi pajak hasil bumi, termasuk ternak hewan yang dibawa keluar kabupaten.

Yang akan menjadi target pungutan PAD yang potensial bagi Pemda Karo adalah kegiatan budidaya tanaman hortikultura. Kegiatan ini sangat berkembang di kabupaten karo karena iklimnya sangat mendukung.

Kabupaten Simalungun

Pada saat dikunjungi oleh tim SMERU, Pemda Kabupaten Simalungun sedang melakukan pembahasan terakhir terhadap 32 raperda baru untuk PAD. Sebanyak 15 diantaranya adalah merupakan perubahan nama dari pungutan yang telah dilarang oleh UU No.18,1997 dan 17 lainnya adalah merupakan sumber PAD baru.

Dari sumber PAD baru tersebut, yang paling diandalkan untuk menjadi sumber PAD yang paling besar adalah raperda tentang Kontribusi Perusahaan Perkebunan Besar (negara dan swasta). Sumber ini diharapkan akan memberikan tambahan PAD sebanyak Rp5 miliar pertahun. Raperda andalan ini akan mewajibkan semua perkebunan besar di kabupaten Simalungun untuk memberikan sumbangan kepada pemda sebanyak 1,5% dari nilai setiap kg produksi yang dihasilkan perbulan. Bagi yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 bulan atau denda 4 kali dari kewajiban sumbangan.

Ada pengusaha perkebunan yang memperkirakan bahwa karena mencakup semua komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, pinang, kemiri, maka raperda tersebut bukan hanya mamunguti perusahaan besar, tetapi juga usaha perkebunan yang skala kecil.

Kabupaten Deli Serdang

Dari 28 perda untuk pungutan yang telah diterbitkan menjelang implementasi otonomi daerah, 13 diantaranya adalah menghidupkan kembali sumber pungutan yang telah dilarang oleh UU No.18,1997. Selebihnya, 15 perda, adalah sumber pungutan baru.

Pungutan yang menonjol terkait dengan produksi dan kegiatan perdagangan antara lain adalah: a) sumbangan wajib untuk usaha perkebunan; b) retribusi hasil usaha pertambahan sebesar 20% dari harga dasar per kg; c) retribusi izin penebangan dan pemanfaatan kayu karet sebesar Rp 1.500/m³; d) pajak terhadap pembudidayaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebesar 20% dari harga dasar per kg; e) retribusi kesehatan hewan sebesar Rp 10.000/ekor untuk hewan besar dan Rp 5.000/ekor untuk hewan kecil; f) retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan sebesar 3% dari harga dasar per kg; g) retribusi izin usaha angkutan umum sebesar Rp 2.500 s/d Rp 25.000 per tahun; h) retribusi izin bongkar muat barang dagangan sebesar Rp 10.000 s/d 20.000 per mobil; dan i) retribusi izin trayek sebesar Rp 3.000 s/d Rp 35.000 per trayek per tahun.

Propinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Sebagian besar pungutan yang ada di tingkat propinsi masih mengacu pada aturan dalam UU No.18,1997. Retribusi jasa ketatausahaan yang diatur dalam Perda No.1, 2000 adalah merupakan bentuk lain dari pungutan 'leges' yang pernah dihapus oleh UU No.18,1997. Pungutan ini dinilai potensial karena menyangkut perizinan yang cakupannya meliputi antara

lain penerbitan Surat izin, rekomendasi, dan surat keterangan; (3) Legalisasi surat-surat; dan (4) Penerbitan SPMU.

Perda No.17,2000 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No. 18, 1997. Besarnya pungutan ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai proyek.

Perda No. 13, 2000 tentang Usaha Perikanan di Sulut merupakan salah satu perda potensial untuk PAD. Jenis pungutan yang diatur didalamnya adalah antara lain:

- a) Pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada pengusaha/pemilik kapal dengan kapasitas 10-30 GT (*Gross Ton*) dan 30-90 HP (*Horse Power*) pada saat mereka mengajukan izin penangkapan ikan. Besarnya tarif pungutan adalah 2,5% dari perkiraan produksi dan harga jual dalam satu tahun. Pemda menargetkan penerimaan dari pungutan ini sebesar Rp625 juta.
- b) Pungutan terhadap usaha budidaya perikanan yang merupakan kewenangan propinsi (wilayah laut antara 4-12 mil dari pantai) ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai produksi.
- c) Retribusi pengujian hasil perikanan serta pungutan yang terkait dengan pengurusan izin berlayar yang diberikan setiap akan berlayar (gross akte dan surat ukur yang berlaku selama kapal beroperasi).

Perda pungutan lainnya disektor perikanan dan usaha perikanan adalah perda No. 1, 2000 dan No. 13, 2000 serta Perda No. 5, 2000 untuk pungutan di pasar grosir dan pertokoan termasuk penyelenggaraan pelelangan ikan (TPI). Besarnya tarif retribusi ditetapkan 5% dari harga/nilai transaksi, 3% dibayar pembeli dan 2% dibayar oleh penjual/nelayan 2%.

Gagasan untuk raperda baru dari berbagai sektor lain adalah:

- a) Sumbangan Pengawasan Mutu dan Pengembangan Produksi Cengkeh dan Pala dalam Propinsi Sulut. Obyeknya adalah pedagang cengkeh dan pala hasil produksi daerah yang dijual atau dibawa ke luar daerah. Setiap pedagang diharuskan memiliki Surat Keterangan Antar Pulau Cengkeh (SKAP-C) atau Surat Keterangan Antar Pulau Pala (SKAP-P) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk itu dikenakan sumbangan sebesar Rp2.000/kg untuk bunga cengkeh dan Rp1.000/kg untuk gagang cengkeh Sementara untuk biji pala belum ditetapkan. Komoditi ini juga sudah menjadi target pungutan di kabupaten penghasil cengkeh dan pala seperti Kabupaten Sangir Talaud, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Minahasa.
- b) Pungutan dalam rangka pengawasan penebangan pohon kelapa, karena batang kelapa merupakan sumber penghasilan baru bagi penduduk untuk memproduksi meubel dan kerajinan. Untuk setiap pohon kelapa (tua) yang ditebang akan dikenakan pungutan Rp 5.000/batang dan pemilik harus segera meremajakannya dengan pohon baru.
- c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sulut akan melakukan pungutan atas pengaturan terhadap perdagangan minuman beralkohol.
- d) Dinas Tenaga Kerja akan melakukan pungutan atas izin penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Sulut.

Kabupaten Minahasa

Sektor perikanan merupakan salah satu andalan sumber PAD bagi Kabupaten Minahasa. Hampir semua bentuk kegiatan di sektor ini dibebani pungutan yang diatur dalam 3 perda, yaitu Perda No. 22, No. 29, dan No. 30, 2000.

Pungutan pada sektor perikanan yang diatur dalam Perda No.22, 2000 tentang Jasa Ketatausahaan berjumlah sekitar 13 jenis. Beberapa di antara nama pungutan agak sulit dibedakan antara maksud satu pungutan dengan pungutan lainnya (lihat tabel 3).

Pada awalnya, pungutan untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebesar 5% dari nilai transaksi pelelangan ikan, di dalamnya termasuk retribusi tempat pelelangan ikan (TPI), namun karena fasilitas TPI yang ada tidak layak pakai, maka para nelayan mengajukan keberatan terhadap besarnya pungutan tersebut. Oleh karena itu, untuk saat ini besarnya pungutan ditetapkan hanya 2,5%.

Tabel 3. Jenis dan Besarnya Pungutan di Sub- sektor Perikanan di Kabupaten Minahasa

Nomor dan Nama Perda	Jenis pungutan	Tarif pungutan
1. Perda No.22, 2000 tentang Jasa Ketatausahaan	a) Surat Izin Usaha Perikanan (budidaya dan penangkapan)	Rp50.000/surat
	b) Surat Izin Penangkapan Ikan	Rp25.000/surat
	c) Rekomendasi Usaha Perikanan	Rp25.000/surat
	d) Rekomendasi Kelayakan Usaha Perikanan	Rp25.000/surat
	e) Rekomendasi untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan	Rp50.000/surat
	f) Rekomendasi untuk memperoleh Izin Lokasi Perikanan	Rp50.000/surat
	g) Surat Keterangan Pengantar Pengangkutan ikan lokal (surat keterangan asal).	Rp12.500/surat
	h) Surat Keterangan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan	Rp100.000/surat
	i) Surat Keterangan Teknis Perikanan	Rp50.000/surat
	j) Surat Keterangan Pengangkutan Ikan	Rp50.000/surat
	k) Tanda Pendaftaran Kegiatan Perikanan: penangkapan, budidaya, pengolahan	Rp10.000 - 25.000/surat
	l) Surat Keterangan Laporan Penangkapan ikan	Rp5.000/surat
	m) Surat Keterangan Lembar Laik Tangkap Operasional	Rp5.000/surat
2. Perda No. 29, 2000 tentang Retribusi Pendaratan Kapal	a. Kapal ikan 1-5GT	Rp5.000/jam
	b. Kapal ikan 5- 10 GT	Rp10.000/jam
	c. Kapal ikan lebih dari 10 GT	Rp15.000/jam
3. Perda No. 30, 2000 tentang Penjualan Perikanan	a. Pungutan usaha penangkapan ikan	2,5% dari nilai transaksi
	b. Pungutan usaha budidaya ikan, rumput laut, dan mutiara	1,0% dari nilai transaksi

Sumber: Hasil penelitian tim SMERU di Sulut

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dulunya membebaskan semua pungutan, sekarang dituntut untuk melakukan pungutan. Karena itu akan mengenakan pungutan terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (SIUI dan TDI) bagi perusahaan dan investasi, serta Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Tanda Daftar

Perusahaan (SIUP dan TDP) yang diatur dalam Perda No. 22, 2000. Tarif pungutan untuk memperoleh SIUP dan TDI ditetapkan berdasarkan nilai investasi yang ditanam, yaitu antara Rp50.000 hingga Rp2 juta. Sementara itu untuk memperoleh SIUP dan TDP dikelompokkan berdasarkan skala dan jenis usaha perdagangan, yang besarnya antara Rp25.000 hingga Rp250.000. Khusus untuk Tanda Daftar Gudang pungutannya ditetapkan Rp1.000/m².

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dalam Perda No. 26, 2000 menetapkan berbagai bentuk pungutan atas pelayanan jasa transportasi darat, laut, serta pos dan telekomunikasi. Termasuk terhadap registrasi kendaraan dan pengemudi melalui penerbitan STNK dan SIM, yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian.

Raperda yang sedang dipersiapkan oleh pemda Sulut antara lain adalah; pungutan terhadap komoditi sayuran oleh dinas tanaman pangan, pungutan untuk pengurusan perizinan tenaga kerja asing yang selama ini harus diurus di tingkat propinsi oleh dinas tenaga kerja, pungutan terhadap hasil Hutan Ikutan oleh dinas kehutanan, pungutan kepada penjahit, salon kecantikan, dan gunting rambut.

Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong)

Perda yang terkalit langsung dengan kegiatan produksi dan perdagangan di wilayah ini antara lain adalah:

- 1) Perda No.19, 2000 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Perincian besarnya retribusi hanya ditetapkan secara umum, berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
- 2) Perda No. 20, 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan menetapkan pungutan atas pengambilan hasil hutan berupa rotan dan damar atau hasil hutan selain kayu. Ada dua jenis pungutan yaitu: (a) retribusi penerbitan surat izin pengambilan hasil hutan ikutan: Rp100/m², dan (b) retribusi hasil hutan ikutan berdasarkan jenis rotan dan damar.

Raperda yang disiapkan untuk peningkatan PAD adalah sebanyak 23 yang dirumuskan oleh berbagai instansi/dinas teknis, yang dikelompokkan atas 9 raperda untuk retribusi jasa umum dan 14 raperda yang mengatur tentang retribusi pelayanan perizinan.

Diantara 23 raperda tersebut, empat raperda mengatur pungutan yang pernah dicabut oleh UU No.18,1997. Yaitu tentang: Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penerbitan Akta Catatan Sipil (sebelumnya retribusi ini digabung dengan Retribusi Biaya Cetak KTP), serta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bolmong menyusun 4 raperda untuk pungutan yaitu: (1) Retribusi di Sektor Industri; (2) Retribusi Perizinan di Sektor Perdagangan; (3) Retribusi Pengendalian Distribusi Barang; dan (4) Retribusi Penyelenggaraan Kemetrolagian.

Untuk sektor kehutanan, semua kawasan hutan yang selama ini tidak dibebani kewajiban akan dijadikan obyek pungutan retribusi perizinan oleh Pemda Kabupaten Bolmong. Rencana tersebut akan diatur dalam 4 bentuk Raperda,

Demikian pula di sektor perkebunan, sedang dipersiapkan raperda tentang Perizinan dan Retribusi Pengelolaan Perkebunan yang isinya antara lain:

- a) Retribusi hasil perkebunan untuk semua jenis komoditi: 2,5%/kg dari harga jual,
- b) Retribusi sarana/prasarana serta mesin-mesin pengolah hasil perkebunan: Rp500.000/tahun,
- c) Retribusi kepada pedagang pengumpul dengan volume 1 (satu) ton keatas: Rp500.000/ton,
- d) Retribusi Fanili sebesar Rp 500.000 untuk volume penjualan kurang dari 500 dan Rp 1 juta untuk penjualan lebih dari 500 kg.

Di sektor perikanan, semua pungutan yang selama ini dibebankan kepada nelayan dan pedagang di TPI dan uangnya masuk ke kas pemda propinsi akan dibatalkan oleh Pemda Kabupaten Bolmong. Semuanya akan diusahakan agar masuk ke kas kabupaten Bolmong. Obyek retribusi di sektor perikanan meliputi izin usaha perikanan, surat penangkapan ikan, pelelangan ikan/retribusi pasar grosir, dan pembudidayaan di laut, air payau dan air tawar.

Di bidang perkoperasian, sejak pembentukan koperasi hingga berbagai kegiatan yang dilakukannya direncanakan akan dijadikan objek pungutan. Hal ini telah dituangkan dalam Raperda tentang Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah.

Kabupaten Gorontalo

Pemda Kabupaten Gorontalo juga menghidupkan kembali retribusi terhadap pelayanan jasa ketatausahaan dan penggantian biaya cetak peta yang diatur dalam Perda No. 66 dan No. 71, 2000. Yaitu: (a) Rp 3000/jenis untuk blanko, formulir atau barang cetakan lainnya; (b) Rp 10.000/jenis untuk surat izin; (c) Rp 5000/jenis untuk surat rekomendasi, keterangan, pendaftaran; (d) Rp 3000/jenis untuk surat lainnya; dan (e) Rp3000/jenis untuk legalisasi surat-surat.

Di sektor kehutanan, terdapat 4 Perda pungutan (No. 12, No. 62, No. 63 dan No. 66, 2000). Dalam Perda No. 12, 2000 ditetapkan besarnya retribusi atas pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan seperti rotan, damar, kemiri, ijuk, madu dan hasil hutan lainnya selain kayu. Misalnya untuk rotan, besarnya pungutan adalah Rp15.000/ton. Pembayaranannya ditetapkan berdasarkan sistem kuota setiap 6 bulan sekali.

Sektor peternakan diatur dalam Perda No. 64 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan dan Pembinaan Peternakan. Aspek yang diatur dalam Perda ini antara lain:

- a) Pendaftaran;
 - Setiap usaha peternakan rakyat diatur oleh Kepala Daerah, dan setiap pengusaha peternakan harus mendaftarkan usahanya.
 - Setiap pembinaan berupa pemasukan atau pengeluaran ternak, hasil ikutan ternak, dan makanan ternak wajib memiliki izin.
 - Jasa dan perizinan yang diterima oleh peternak atau pengusaha peternakan berupa pengamanan, pengawasan dan pembinaan dikenakan pungutan retribusi. Untuk ternak besar (sapi, kerbau, kuda):
- (a) pengamanan dan pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak atau pemeriksaan kesehatan ternak tarifnya Rp5.000/ekor,

(b) pembinaan peternakan berupa pemasukan/pengeluaran ternak atau izin pengeluaran ternak tarifnya Rp45.0000/ekor

Pungutan lain yang dibebankan pada sub-sektor ini adalah berupa retribusi pasar ternak (dikelola oleh Dinas Pasar) yang besarnya ditetapkan Rp10.000/ekor ternak yang terjual.

Di sektor perkebunan, jenis dan besarnya pungutan diatur dalam Perda No.65,2000 tentang Retribusi Pengamanan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Perkebunan yang berisi:

- Setiap penebangan pohon kelapa untuk tujuan komersial dipungut Rp2.500/pohon,
- Penerima jasa pengamanan, pengawasan, dan pembinaan usaha perkebunan dengan tarif ditetapkan berdasarkan jenis bibit tanaman perkebunan yang diusahakan, besarnya berkisar antara Rp10–Rp50/bibit/stek, kecuali untuk benih jahe sebesar Rp150/kg,
- Pendaftaran usaha perkebunan rakyat dan besar, besarnya tarif ditentukan berdasarkan kapasitas produksi bibit, yaitu rata-rata Rp50.000/tahun.

Propinsi Jawa Barat (Jabar)

Pemda Propinsi Jawa Barat telah menerbitkan Perda No.9, 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada dasarnya hanya mengatur pengenaan retribusi pelelangan ikan. Perda ini menetapkan besarnya tarif retribusi pelelangan 5% dari nilai transaksi, dengan perincian 3% dibayar oleh pembeli dan 2% dibayar oleh nelayan. Pengelolaannya dilakukan atas kerjasama antara pemda propinsi dan pemda kabupaten, sehingga tidak ada konflik kepentingan. Untuk TA 2001, penerimaan dari retribusi pelelangan ikan setelah dikurangi biaya lelang diperkirakan mencapai Rp 1,1 miliar.

Pada TA 2000 pemda telah mensahkan dua perda yang mengatur pungutan di sector perkebunan, yaitu: 1) Perda No. 23, 2000 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat; dan 2) Perda No. 24, 2000 tentang Usaha Pengolahan Teh. Kedua perda ini dibuat karena berkaitan dengan urusan dan kepentingan lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemda propinsi. Tetapi berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-486/MK.07/2001 tentang Pertimbangan Menteri Keuangan atas Perda tentang Pajak dan Retribusi yang ditujukan kepada Mendagri, kedua perda itu termasuk ke dalam daftar perda yang direkomendasikan agar dibatalkan.

Pada tahun 2001, Pemda Jabar mensahkan Perda No. 6, 2001 tentang Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan Tanah (APT) yang juga belum dipungut secara efektif. Menurut UU No.34, 2000, kewenangan pengaturan dan pemungutan pajak ini diserahkan kembali kepada pemda propinsi, sebelumnya berada di kabupaten / kota sesuai dengan UU No. 18, 1997.

Selain perda pungutan, pemda Jabar juga menerbitkan beberapa perda yang sifatnya pengaturan saja yaitu: (1) Perda No. 8, 2000 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (perubahan Perda No. 10, 1998); (2) Perda No. 22, 2000 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan; (3) Perda No. 10, 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (4) Perda No. 16, 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah; dan (5) Perda No. 17, 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan.

Sementara itu, ada lima raperda baru yang berkaitan dengan pengaturan perizinan dan pungutan masih dalam pembahasan DPRD, yaitu: (1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan antar Propinsi, Ransum Makanan serta Penyidikan Penyakit Hewan; (2) Pengurusan Hutan; (3) Peredaran Hasil Hutan di Jabar; (4) Penyelenggaraan Perhubungan; dan (5) Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.

Untuk lebih meningkatkan PAD, pemda sedang memikirkan untuk memperluas sumber penerimaan PAD melalui beberapa sumber potensial antara lain yaitu:

- a) Pungutan terhadap kegiatan BUMN yang selama ini mereka banyak menggunakan aset pemda tanpa dibebani pungutan apapun.
- b) Mengusahakan agar pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditangani langsung oleh pemda.
- c) Perberlakuan sertifikasi mutu benih ikan untuk melindungi budidaya ikan di Waduk Cirata dan untuk pembinaan kelompok petani pembenihan ikan produk benih ikan unggulan daerah, misalnya benih gurame dari Ciamis, ikan mas dan ikan nila dari Majalaya. Sertifikasi ini direncanakan akan diberlakukan tahun depan.
- d) Di sektor perhubungan, pemprop telah memikirkan untuk memberlakukan beberapa bentuk perizinan dan pungutan, misalnya pungutan uji mutu untuk karoseri kendaraan dengan besar pungutan sebagai berikut: 1) Rp 50.000 untuk bobot kurang dari 5 ton ; 2) Rp 75.000 untuk bobot antara 5-10 ton; 3) Rp 100.000 untuk bobot lebih dari 10 ton. Pemprop memperkirakan setiap tahun ada 10.000 kendaraan yang akan diuji, sehingga target penerimaannya bisa mencapai Rp 500 – Rp 800 juta/tahun.
- e) Terkait dengan potensi pungutan di sektor perhubungan, pemda juga akan memperjelas kewenangan propinsi atas angkutan kota yang melintasi kota/kabupaten di dalam propinsi. Hingga saat ini batasan lintas batas dalam UU tidak jelas, sehingga sulit menetapkan kewenangan mana yang harus dikerjasamakan dan mana yang sepenuhnya merupakan kewenangan propinsi.
- f) Mengoptimalkan fungsi jembatan timbang. Saat ini sedang dilakukan renovasi dan peningkatan kapasitasnya.

Kabupaten Cirebon

Jenis pungutan daerah yang efektif dipungut pada TA 2001 pada umumnya berupa pungutan lama. Untuk TA 2002, pemda merencanakan memberlakukan beberapa jenis pungutan baru dan memperbaharui pungutan lama untuk dipungut kembali.

Pemungutan atas sumbangan pihak ketiga (SPK) masih terus dilakukan dengan mengacu pada perda lama, yaitu Perda No. 7, 1987. Salah satu bentuk SPK yang saat ini diberlakukan adalah pungutan kepada pengusaha eksportir sebesar Rp 10.000 per kontainer. Pemungutan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat pengusaha mengurus Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Setiap bulan diperkirakan sekitar 800 kontainer dikirim ke luar Kabupaten Cirebon.

Pemda Cirebon juga telah membuat dua perda pungutan lainnya yang merupakan pemberakuan kembali pungutan yang sebelumnya pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997,

yaitu Perda No. 51, 2001 tentang Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Walet dan Perda No. 52 tentang Retribusi Penggunaan Dokumen Lelang. Kedua jenis pungutan tersebut disahkan kembali pada September 2001 dan mengacu pada UU No. 34, 2000. Tarif pajak hasil usaha burung walet ditetapkan 10% dari nilai jual sarang burung walet. Target perolehan pajak burung walet adalah Rp155 juta. Sementara itu, tarif retribusi penggunaan dokumen lelang ditetapkan 0,1% dari nilai pekerjaan proyek. Sedangkan terhadap proyek yang dilakukan melalui penunjang langsung dikenakan retribusi 0,2% dari nilai pekerjaan proyek.

Untuk lebih meningkatkan PAD, Bagian Hukum Pemda Cirebon telah mempersiapkan 18 raperda baru, yaitu antara lain:

- (1) Retribusi Tata Informasi Daerah yang berkaitan dengan pengawasan persewaan *video compact disk* (VCD), dan siaran radio daerah.
- (2) Inventarisasi atas jenis pajak dan retribusi, termasuk pungutan yang pernah dilakukan oleh bekas instansi vertikal. Usaha ini dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan pusat (UU No. 34, 2000 dan UU No. 22, 1999).
- (3) Pemda berharap adanya kerelaan dari pusat untuk memberikan hak pungut atas beberapa bentuk pajak yang telah ada. Misalnya, pajak pertambahan nilai di bidang telekomunikasi (jasa telepon), pajak ABT dan APT sebaiknya kewenangannya tidak ditarik kembali ke propinsi, serta pajak kendaraan bermotor (PKB)/bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pusat atau propinsi cukup mengatur mekanisme pembagian hasilnya saja.
- (4) Dinas Pertanian sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan retribusi penggilingan padi. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan kapasitas mesin yang digunakan. Dinas sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan penjualan sarana produksi yang masuk ke wilayah sebagai sumber retribusi. Banyak sumber PAD yang bisa digali asalkan konsep agribisnis berjalan baik dan petani mendapatkan hasil yang wajar, sehingga beban pungutan tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan petani.
- (5) Dinas Perikanan dan Kelautan sudah menyusun konsep pra-raperda tentang Izin Usaha Perikanan untuk kapal di bawah 10 GT.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan akan mengajukan raperda tentang perizinan perindustrian dan perdagangan yang bentuknya seperti yang selama ini diberlakukan, yaitu meliputi pelayanan penerbitan tanda pendaftaran industri (TPI), surat izin usaha industri (SIUI), tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar gudang (TDG). Konsep sebagian perda tersebut sudah ada.
- (7) Dinas Perhubungan sedang merumuskan peraturan tentang retribusi bongkar muat di jalan yang harus dibayar oleh pengusaha pada saat melakukan kir setiap enam bulan.

Kabupaten Garut

Jumlah perda lama untuk pungutan, sesuai UU No.18,1997, di Kabupaten Garut adalah 21 jenis, terdiri dari 6 perda pajak dan 15 perda retribusi. Setelah UU No. 22,1999, dan keluarnya UU No. 34, 2000 sebagai revisi UU No. 18, 1987 pemda mulai menerbitkan kembali perda yang dihapus berdasarkan UU No. 18, 1997 serta perda-perda baru berdasarkan kewenangan pemda yang diatur dalam UU No. 22, 1999 dan PP No.25,2000.

Pada tahun 2001, Pemda Garut telah mensahkan 24 perda baru, 17 di antaranya terkait dengan pungutan, yaitu satu perda pajak dan 16 perda retribusi. Tiga diantara perda pungutan baru merupakan perubahan perda lama yang sudah berlaku. Dengan demikian jumlah keseluruhan perda pungutan yang berlaku di Kabupaten Garut pada tahun 2001 adalah 38.

Perda yang dianggap potensil adalah; (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target Rp68,8 juta; (2) Retribusi Izin Pengelolaan Kayu Milik dengan target Rp 12 juta; dan (3) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah dengan target Rp33 juta.

Dengan adanya pungutan baru serta rencana intensifikasi pajak dan retribusi daerah, PAD Kabupaten Garut mengharapkan dapat menerima total sebanyak Rp15,9 milyar, atau meningkat 70% dari realisasi TA 2000 yaitu sebesar Rp9,3 milyar.

Dinas yang paling banyak mengelola perda pungutan baru adalah Dinas Perhubungan. Perda yang dikelolanya antara lain:

- a. Perda No. 4, 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan target Juli-Desember 2001 sebesar Rp68 juta.
- b. Perda No. 5, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum, dengan target Juli-Desember 2001 sebesar Rp60 juta.
- c. Perda No. 6, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Angkutan, dengan target Juli-Desember 2001 sebesar Rp9 juta.
- d. Perda No. 7, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Bongkar Muat Barang, dengan target Juli-Desember 2001 sebesar Rp6 juta.
- e. Perda No. 8, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas dengan target Juli-Desember 2001 sebesar Rp 5 juta.

Masalah yang muncul dibidang transportasi yang tidak dapat ditertibkan oleh pemda adalah banyaknya pungli di jalan, baik yang dilakukan oleh *preman* yang terorganisasi dan melibatkan oknum. Di daerah Jonggol dan Purwakarta, misalnya, para *premanisme* memberlakukan pungutan yang besarnya sekitar Rp 300.000 / truk / tahun. Preman-preman ini terorganisasi dalam kelompok-kelompok yang masing-masing menguasai suatu wilayah tertentu. Sebagai bukti bahwa truk yang lewat sudah membayar “iuran” di badan truk ditempelkan kode nama ketua kelompok preman telah menerima pungutan. Saat masuk ke pasar induk di Jakarta, truk-truk juga menjadi sasaran pungutan. Begitupula di terminal, juga cenderung lebih mahal dari peraturannya.

Beberapa perda yang telah diterbitkan Pemda Garut bisa terancam dibatalkan jika mengacu pada Surat Menkeu No.S-486/MK.07/2001. Pertimbangannya adalah:

- 1). Pengertian pelayanan dalam setiap perda. Di balik beberapa retribusi baru yang dikeluarkan, tidak jelas bentuk pelayanan yang akan diberikan, terutama retribusi yang dikategorikan sebagai retribusi perizinan khusus. Contohnya, Retribusi Pelayanan Izin Bongkar Muat Barang dan Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik.
- 2) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Perah (Perda No. 14, 2001). Perda tentang retribusi pemeriksaan hewan, ternak, hasil ternak, dan hasil ikutannya (termasuk susu sapi perah) di kabupaten lain dipertimbangkan untuk dibatalkan berdasarkan surat Menkeu. Alasannya, pemeriksaan hewan/ternak dan hasil ikutannya tidak dapat dikenakan retribusi, sebab tidak ada jasa nyata yang disediakan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 3) Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik yang diatur dalam Perda No.9,2001. Perda ini disahkan pada Juni 2001, dan mulai diberlakukan sejak September 2001. Pengertian kayu milik adalah kayu yang dihasilkan dari tanah milik rakyat, baik perorangan maupun badan. Retribusi yang harus dibayar atas izin pengelolaan kayu milik meliputi:
 - Izin penebangan pohon dengan retribusi antara Rp1.000-Rp2.500 per pohon, tergantung pada jenis pohon.
 - Retribusi pengangkutan kayu dengan retribusi antara Rp2.000-Rp3.500/m³ tergantung jenis pohon, dan Rp350/m³ untuk kayu bakar.
 - Pemeriksaan gergaji kayu dengan retribusi antara Rp15.000-Rp100.000/gergaji, tergantung pada jenis gergaji.

Meskipun tujuan retribusi ini baik, yaitu untuk mendukung kelestarian sumber daya alam (SDA), tetapi rumitnya proses perizinan bisa mendorong timbulnya praktek pungli. Retribusi sejenis tentang pemanfaatan hasil hutan pada tanah milik di Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk retribusi yang disarankan untuk dibatalkan dalam Surat Menkeu No. S-486/MK.07/2001. Alasannya: (a) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanah milik pada prinsipnya tidak memerlukan pengendalian dari pemda karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi; (b) pada prinsipnya daerah dapat lebih mengoptimalkan penerimaannya melalui PBB; (c) Kepemilikan gergaji tidak memerlukan izin karena tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi.

- 4) Berdasarkan surat pertimbangan Menkeu, semua jenis pungutan dalam bentuk SPK, apapun objek pungutan yang dikenakan, tergolong dalam perda pungutan yang disarankan untuk dibatalkan. Alasannya, karena bertentangan dengan kepentingan umum, dan sumbangan harus bersifat sukarela, tidak boleh ada unsur pemaksaan.

Pemda Kabupaten Garut sedang memikirkan kemungkinan untuk membuat perda tentang kelebihan muatan kendaraan, mengingat adanya beberapa jenis kelas jalan. Namun, pemkab masih memerlukan klarifikasi mengenai kelas jalan yang ada. Perda kelebihan muatan di kabupaten lain, seperti di Kabupaten Indramayu, Batang Hari, dan Bekasi, termasuk perda yang oleh Menkeu diusulkan untuk dibatalkan.

Kabupaten Ciamis

Tahun 2001, Pemda Kabupaten Ciamis sudah mensahkan 27 perda baru, 19 di antaranya terkait dengan pungutan, yaitu satu perda pajak, 16 perda retribusi, dan dua perda pungutan berupa sumbangan pihak ketiga. Dari 19 perda pungutan yang disahkan tersebut, enam diantaranya merupakan perda revisi dari perda yang sudah berlaku. Selebihnya merupakan perda baru yang dibuat karena adanya pergeseran kewenangan dari pusat/propinsi ke tingkat kabupaten/kota berdasarkan PP No. 25, 2000, dan perda yang pernah dihapus oleh UU No. 18, 1997 yang kemudian dihidupkan kembali, seperti Perda Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi.

Beberapa perda pungutan baru tersebut masuk kategori dipertimbangkan untuk dibatalkan oleh pemerintah pusat, antara lain adalah:

- 1) Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Perda No. 27, 2001). Perda ini disusun berdasarkan UU No.34,2000 yang memberikan peluang kepada daerah untuk menetapkan pajak di luar yang tercantum dalam UU. Beberapa perda pajak atas komoditi seperti ini di daerah lain masuk dalam pertimbangan untuk dibatalkan berdasarkan surat Menkeu.
- 2) Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang (Perda No.17,2001), Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik (Perda No.10,2001), Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame (Perda No. 19, 2001). Tiga retribusi ini di kabupaten lain termasuk retribusi yang dipertimbangkan untuk dibatalkan. Karena: (a) retribusi ini bersifat pajak karena tarifnya tidak dikaitkan dengan besarnya biaya pembongkaran; dan (b) reklame telah menjadi objek pajak sehingga adanya tambahan retribusi terhadap reklame tersebut akan memberatkan masyarakat.
- 3) Retribusi Pelayanan Dokumen Lelang (Perda No.24,2001) dan Pertambangan Umum di Kabupaten Ciamis (Perda No.13,2001). Kedua perda ini ditempatkan di pos pendapatan SPK. Karena itu, bertentangan dengan prinsip sumbangan yang sifatnya sukarela. SPK termasuk perda yang dipertimbangan untuk dibatalkan dalam surat Menkeu.

Perolehan semua perda pungutan ditargetkan untuk dimasukkan dalam perubahan APBD 2001. Penerimaan yang cukup besar berasal dari retribusi pelelangan ikan (Rp 297,5 juta) dan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp 252 juta). Total target penerimaan dari perda pungutan baru pada TA 2001 sebesar Rp988,46 juta, target ini meningkat menjadi Rp 1.172,8 juta untuk TA 2002.

Untuk lebih mekasimalkan penerimaan PAD, Pemda Ciamis tidak hanya menciptakan perda baru, tetapi juga meningkatkan target pungutan dari sumber-sumber yang sudah ada. Contoh; (a) penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran pada TA 2000 hanya sebesar Rp 487 juta, untuk TA 2002 ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi Rp 850 juta; (b) Penerimaan Retribusi Pasar pada TA 2000 sebesar Rp 472 juta, sedangkan untuk TA 2002 ditargetkan naik lima kali lipat menjadi Rp 2,75 milyar.

3. Setiap Dinas Ditetapkan Target PAD, Dikaitkan Dengan Alokasi Anggaran dan Kinerja Kepala Dinas

Struktur organisasi pemda propinsi dan kabupaten dimekarkan. Alasan yang dikemukakan adalah untuk meningkatkan pelayanan, tetapi pada kenyatannya lebih cenderung diperuntukkan untuk menjangkau semua aktivitas ekonomi agar dapat memaksimalkan peningkatan PAD.

Di tingkat Pemda Propinsi Sulut dan di Kabupaten Simalungun ditetapkan bahwa kriteria keberhasilan suatu instansi / dinas diukur dari kemampuannya dalam menyumbang PAD. Ada ancaman, jika tidak memberi sumbangan dana bagi daerah maka dinas akan dihapus dan kewenangannya akan dilimpahkan ke Biro/Bagian Perekonomian di bawah Sekertaris Daerah (Sekda). Acaman lainnya yang lebih ringan adalah pencairan dana operasionalnya akan ditunda atau dikurangi.

Di Kabupaten Gorontalo, jika target perolehan PAD yang dibebankan kepada dinas bersangkutan tidak terpenuhi maka konsekwensi yang dihadapinya dapat berupa: (1) Pejabat Jabatan Kepala Dinas diganti; (2) Alokasi anggaran rutin dinas akan dikurangi, dan (3) Dinas yang bersangkutan akan digabung dengan instansi/dinas atau bagian lain.

4. Hubungan Antara Kabupaten/kota dan Propinsi Menjadi Kabur dan Berimplikasi Pada Tarik Menarik Kepentingan Sehingga Terjadinya Pungutan Ganda atau Tumpang Tindih Pada Obyek Pajak dan Retribusi Yang Sama.

Dengan otonomi, pemda kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki propinsi, dan hubungan hirarki antara propinsi dengan kabupaten/kota juga menjadi terputus. Koordinasi antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam beberapa bidang atau aspek yang sifatnya strategis hingga sekarang belum terbentuk.

Karena kewenangannya, pemda kabupaten membuat struktur organisasi sejalan dengan tujuannya meningkatkan PADnya. Dengan pertimbangan bahwa masih memiliki kewenangan, propinsi juga melakukan hal yang sama dimana perda tentang pungutan untuk PAD ditujukan pada obyek pajak dan retribusi yang hampir sama dengan yang dibuat kabupaten. Dengan demikian, dalam beberapa kasus telah terjadi dan besar kemungkinan akan menjadi meluas, terjadinya pemberlakuan pungutan yang tumpang tindih antar kabupaten dan propinsi. Masalah ini telah menjadi kekhawatiran banyak kalangan, terutama para pengusaha setempat. Beberapa contoh dapat dikemukakan tentang masalah ini:

Di Propinsi Sulawesi Utara:

- a. Pemda propinsi mengeluarkan perda pungutan terhadap usaha perikanan. Penerimaan dari pungutan tersebut kemudian dibagikan, untuk pemda propinsi 80% dan untuk pemda kabupaten/kota 20%. Tetapi mungkin tidak puas dengan rumus pembagian tersebut, pemda kabupaten/kota yang memiliki wilayah yang dijadikan sasaran pungutan, juga membuat perda tentang hal yang sama. Jadi ada kemungkinan di setiap TPI berlaku dua perda yang obyeknya sama.

- b. Pemda kabupaten menuntut kepastian diteruskannya kewenangan yang sebenarnya menjadi haknya, misalnya menyangkut keberadaan pelabuhan dan fasilitas pelelangan ikan yang ada di wilayahnya.
- c. Di sektor perkebunan, Pemda Kabupaten Minahasa pernah menyusun raperda tentang pungutan perdagangan komoditi cengkeh dan kelapa yang juga sedang dibuat oleh pemda propinsi. Tetapi pemda propinsi memberi peringatan bahwa kegiatan perdagangan komoditi tersebut berkaitan dengan kewenangan lintas kabupaten.
- d. Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa mendapat tugas untuk memberi kontribusi terhadap penambahan PAD. Karena instansi ini tadinya bersatu dengan propinsi maka terjadi kebingungan dan tarik-menarik kewenangan antara dinas perdagangan kabupaten dan propinsi dalam hal siapa yang berwenang menarik pungutan pada obyek-obyek PAD yang potensial. Misalnya, untuk urusan kemetrotrologian, dinas kabupaten berkeinginan mengambil alih tetapi propinsi bertahan bahwa tugas ini harus dilakukan oleh dinas provinsi karena alat dan ahli di bidang ini tidak dimiliki oleh dinas kabupaten. Akhirnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa mengalah tetapi menuntut adanya bagi hasil dari jasa pelayanan tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Bolmong, Dinas Kabupaten Bolmong bahkan bersikeras bahwa sebaiknya kewenangan berada ditangani kabupaten karena operasional pelayanan yang paling dekat ada di tingkat kabupaten. Jika kabupaten belum mampu maka propinsi perlu memberikan bantuan teknis.
- e. Pengusaha rotan di Kabupaten Bolmong bingung tentang tarik menarik kewenangan antara pemda propinsi dan kabupaten. Sebagai contoh, seorang pengusaha mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan hutan di pemda kabupaten, namun permintaan izin tersebut ditolak. Pengusaha tersebut kemudian mengajukan izin yang sama melalui pemda propinsi dan diabulkan. Tetapi, ketika mulai melakukan aktifitasnya, pengusaha tersebut mendapat teguran keras dari pemda kabupaten dan bahkan dilarang beroperasi di daerah tersebut. Pengusaha tersebut menjadi sangat bingung karena semasa pemerintahan orde baru hal demikian tidak pernah terjadi.

Di Propinsi Jawa Barat:

- a. Menurut PP. No. 25, 2000, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Perda Propinsi No.6,1999 yang mengatur hal tersebut dicabut dengan Perda No.15, 2001. Namun demikian, propinsi masih menetapkan target perolehan retribusi ini dengan alasan bahwa peralatan pengujian berupa buku uji, timah, segel, dan lainnya, serta tenaga ahli pelaksana masih berstatus sebagai pegawai pemda propinsi. Selain itu, perlengkapan untuk pengujian hanya delapan unit, padahal jumlah kabupaten/kota ada 22 buah.
- b. Hingga saat ini kewenangan pengelolaan TPI masih diperebutkan oleh propinsi dan kabupaten/kota. Penarikan retribusi TPI oleh pemda propinsi diatur dalam Perda No. 8 dan 9, 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Selain soal pungutan TPI, sumber PAD lain dari sektor perikanan yang akan diciptakan oleh pemda propinsi, antara lain regulasi perizinan penangkapan ikan untuk ukuran kapal 10-30 GT, sertifikasi mutu benih ikan, dan surat keterangan kesehatan ikan yang akan diekspor. Pemda Cirebon juga telah memutuskan membuat perda sendiri mengenai pengelolaan TPI yang diatur dalam Perda No. 53, 2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Perda No. 54, 2001 tentang Retribusi TPI. Pemda Cirebon berkeyakinan bahwa pengelolaan TPI seharusnya ditangani kabupaten, karena itu

mereka mengabaikan perda propinsi. Perda No. 54, 2001, menetapkan bahwa besarnya pungutan TPI ditetapkan 3% dari nilai lelang. Di samping itu juga ada pungutan untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan yang ditetapkan untuk pertama kali sebesar Rp100 ribu dan untuk pendaftaran ulang sebesar Rp25 ribu. Target pendapatan dari retribusi TPI yang diharapkan pemda Cirebon adalah Rp60 juta.

- c. Di sektor perkebunan dan kehutanan, kewenangan pemda propinsi masih tumpang-tindih dengan kewenangan yang diserahkan kepada kabupaten / kota. Keberadaan Perda No. 23, 2000 tentang Penebangan Kayu dan Perda No.24,2000 tentang Usaha Pengolahan Teh, misalnya, ternyata berbenturan dengan perda Kabupaten Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya yang juga mengatur hal yang sama.
- d. Pergeseran kewenangan pemda propinsi kepada pemda kabupaten / kota menjadikan pengembangan berbagai aspek dibidang perindustrian dan perdagangan menjadi tidak terkoordinasi. Dikhawatirkan akan terjadi munculnya blok-blok perdagangan daerah, karena setiap daerah cenderung memproteksi komoditi yang dianggap menjadi unggulan daerah yang bersangkutan.
- e. Sumber konflik potensial lainnya adalah masalah-masalah yang menyangkut urusan pelayanan, seperti penyediaan air bersih dan persampahan yang pada kenyatannya harus melewati batas wilayah satu kabupaten.

5. Pungutan Juga Dilakukan Ditingkat Desa Untuk Kas Desa

Otonomi bukan hanya terjadi di tingkat kabupaten tetapi juga ditingkat desa. Karena itu, aparat pemerintahan desa juga berusaha untuk mengisi kas desanya dalam rangka membiayai pengeluaran operasional pemerintahan otonominya:

- a) Di Kabupaten Simalungun, pemda setempat telah menerbitkan sebuah perda bernomor 17,2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagori (desa). Dalam perda ini dinyatakan bahwa salah satu sumber keuangan nagori adalah hasil pungutan nagori. Karena itu setiap nagori dibenarkan untuk melakukan pungutan terhadap usaha perkebunan di wilayahnya. Menyikapi perda ini, pemerintahan beberapa nagori (desa) melakukan pungutan. Besarnya pungutan yang telah dilakukan adalah satu hingga tiga janjang kelapa sawit dari setiap truk yang melewati nagorinya. Selain itu, beberapa nagori bahkan langsung menerbitkan peraturan desa untuk melakukan pungutan di jalan bagi setiap angkutan barang yang keluar masuk wilayahnya.
- b) Di Kabupaten Minahasa, beberapa desa telah dan akan melakukan pungutan sebesar Rp100-200/kg cengkeh yang diperdagangkan oleh petani atau pedagang pengumpul untuk mengisi kas desa.
- c) Pada Juli 2001, pemerintahan desa di seluruh Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, sepakat untuk memberlakukan pungutan terhadap perdagangan teh. Besarnya pungutan desa ditetapkan Rp25/kg tetapi pihak pabrik menawar hanya Rp 10/kg. Pungutan dilakukan melalui pabrik pengolah. Walaupun pungutan tersebut dibebankan pada pabrikan, tetapi tetap ada kekhawatiran bahwa pada akhirnya pungutan tersebut juga membebani petani. Petani menjual daun tehnya kepada pedagang pengumpul desa kemudian dijual ke pabrik pengolahan. Harga jual petani saat ini adalah Rp600/kg.

Ongkos petik daun teh Rp125/kg. Harga jual pedagang ke pabrikan Rp625-650/kg. Ongkos angkut ke pabrikan ditanggung oleh pabrik pengolah.

Pungutan yang menjadi beban pedagang meliputi pungutan liar di jalan raya dan desa sebesar Rp25.000/bulan. Pungutan desa ini dikenakan dengan alasan untuk pemeliharaan jalan desa yang sering dilalui kendaraan pengangkut daun teh.

- d) Di Kabupaten Gorontalo, di tingkat desa ada pungutan untuk penerbitan surat keterangan kepemilikan ternak, yang besarnya tergantung keputusan di masing-masing desa.

6. Mulai Muncul Beberapa Pengaturam Non-Tarif Yang Bersifat Distorsi dan Diskriminatif Terhadap Pelaku Usaha

Hingga saat ini, kebijakan yang dibuat pemda propinsi dan pemda kabupaten/kota umumnya masih terfokus pada usaha mencari sumber PAD. Namun demikian, walaupun belum ada perhatian secara serius tetapi sudah ada pemda propinsi dan kabupaten yang memulai memunculkan dan memberlakukan pengaturam atau kebijakan non-tariff berupa pengaturam yang sifatnya diskriminatif terhadap dunia usaha diwilayahnya.

Kecenderungan terbitnya SK atau perda yang bersifat *protectionist* dan *interventionist* umumnya disebabkan karena adanya desakan oleh para pengusaha lokal yang membutuhkan proteksi agar bisa tetap menduduki posisi yang menentukan di dalam pasar di wilayahnya.

Dalam era otonomi, dimana pemda memiliki kewenangan yang lebih besar serta dengan harapan akan mendapatkan benefit dari berkembangnya perusahaan yang diproteksi tersebut, desakan pengusaha daerah / lokal tersebut sangat mudah dipenuhi oleh pemda.

Isu putra daerah atau pengusaha daerah yang banyak dikhawatirkan berbagai kalangan, karena bisa melahirkan kebijakan pemda yang bersifat diskriminatif dan pilih kasih, sudah mulai terwujud di beberapa daerah.. Berikut beberapa kasus yang ditemukan di lapangan:

Kasus 1:

Di tingkat Provinsi Sulut, yaitu menyangkut bidang farmasi yang diatur dalam SK Gubernur No.4dz/03/891 tanggal 13 September 2001 tentang Penangguhan Sementara Pendirian Pedagang Besar Farmasi di Sulut. Pemda Propinsi Sulut membatasi kepemilikan apotik kepada pengusaha yang tidak berdomisili di Sulut untuk tujuan memproteksi pengusaha lokal. Berikut rangkuman isi SK Gubernur tersebut:

1. Yang mendapat status Pedagang Besar Farmasi Daerah hanya yang berkantor pusat, memiliki/menguasai aset, dan berdomisili di wilayah Propinsi Sulut. Yang lainnya hanya diberikan status sebagai Cabang/ Perwakilan Pedagang Besar Farmasi. Pedagang Besar Farmasi daerah tersebut wajib memiliki gedung/tempat usaha sesuai ketentuan dengan status hak milik.
2. Pedagang Besar Farmasi Daerah diprioritaskan sebagai rekanan pemerintah dalam pengadaan farmasi sampai dengan nilai Rp4 milyar.
3. Pendirian Pedagang Besar Farmasi Cabang harus direkomendasikan oleh Gabungan Pedagang Besar Farmasi Indonesia Daerah Propinsi Sulut.

4. Pengurus inti Gabungan Pedagang Besar Farmasi Indonesia Daerah Propinsi Sulut dijabat oleh anggota yang berasal dari daerah.
5. Karyawan Pedagang Besar Farmasi Cabang, kecuali pimpinan, diprioritaskan berasal dari tenaga kerja daerah.
6. Pedagang Besar Farmasi Cabang diharapkan bermitra dengan Pedagang Besar Farmasi daerah dalam menyalurkan produknya di Sulut.

Kasus 2:

Keluarnya SK Gubernur No. 27, 2001 pada 22 Maret 2001 tentang pembentukan tim kajian dan pengendalian harga kelapa/kopra beserta turunannya di Sulut. Kebijakan ini ditempuh pemda untuk memenuhi tuntutan para petani kelapa yang tergabung dalam Apeksu (Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara) yang pada tanggal 12 Maret 2001 melakukan demo terhadap pemda (lihat Kotak 1). Tim yang dibentuk tersebut diketuai oleh ketua Apeksu. Tugas tim yang utama adalah: a) melakukan kajian produksi, harga dan kebijakan pemerintah tentang kopra; b) merumuskan tingkat harga yang wajar ditingkat petani; dan c) melakukan sosialisasi hasil kajian dan rumusan tingkat harga pada point (a) dan (b).

Kotak 1

Sepuluh (10) Tuntutan Petani Kelapa/Kopra Di Sulut yang Dikemukakan Dalam Demonstrasi Pada 12 Maret 2001 Di Depan Kantor Gubernur Sulut

1. Kepentingan petani kelapa menempati diatas 80% dari hasil komoditi pertanian Sulut, sehingga tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi Pemerintah Sulut untuk berpihak kepada petani kelapa secara nyata.
2. Bentuk tim penetapan dan pengendali harga kopra yang terdiri dari petani kelapa, pengusaha, dan pemerintah.
3. Naikkan harga kopra (1kg kopra setidaknya sama dengan 1kg beras) atau ganti lambang Sulawesi Utara. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, harga kopra tetap terpuruk, maka tolong Pak Sondakh (Gubernur Sulut), Pak Sualang (Wakil Gubernur Sulut), dan Pak Damopolii (Ketua DPRD Sulut) secara gentlemen mengundurkan diri dari jabatannya.
4. Stop pasokan minyak kelapa sawit (dari wilayah lain) ke wilayah Sulut.
5. Stop beli minyak kelapa sawit bagi warga Sulut, dan tingkatkan budaya konsumsi minyak kelapa dalam.
6. Pemerintah daerah & Apeksu harus memperjuangkan ke pemerintah pusat kucuran dana subsidi pengembangan kelapa dalam (termasuk dana rehabilitasi kelapa), seperti halnya dengan kelapa sawit. Juga menyerahkan ke daerah PPN & PPh yang telah dibayar oleh PT Bimoli dan perusahaan lainnya.
7. Tangguhkan pembayaran PBB bila harga kopra tetap terpuruk seperti sekarang.
8. Lacak & serahkan semua aset YKM/PKKDM untuk dikelola dan dipergunakan petani kelapa Sulut.
9. Usut dan tertibkan para mafia penimbun kopra yang sudah berkolusi dengan pengusaha kopra, serta stop kontrak harga kopra dengan pedagang yang berasal dari luar Sulawesi Utara.
10. Jual beli kopra harus ditempuh via lelang yang dikoordinir oleh Apeksu.

Semua tuntutan diatas harus dipenuhi, jika tidak petani akan melakukan aksi-aksi yang sifatnya "represif".

Kasus 3:

Gapensi di Kabupaten Bolmong mengeluh karena anggotanya sering gagal dalam mendapatkan proyek pusat di daerahnya. Proyek tersebut selalu dilaksanakan oleh pengusaha dari luar dan tidak melibatkan pengusaha lokal/setempat. Oleh karena itu, Gapensi mengusulkan kepada pemda setempat agar mengambil kebijakan khusus yang dapat menolong anggotanya. Kebijakan yang dimaksud adalah suatu pengaturan tegas yang memberi prioritas kepada pengusaha lokal/setempat untuk melaksanakan semua proyek pusat dan daerah yang ada di daerahnya.

Kasus 4:

Perusahaan *cold storage* dan eksportir ikan tuna, Usaha Mina, mengusulkan dan mendesak kepada Pemda Kabupaten Minahasa untuk membatasi jumlah (menerapkan *negative list*) perusahaan *cold storage* yang akan masuk ke wilayahnya karena dianggap sudah *over capacity*. Kalau masih ditambah, dikhawatirkan perusahaan yang sudah ada akan saling mematikan.

7. Pelayanan Publik dan Aspirasi Masyarakat Terabaikan

Beberapa tanggapan atau pernyataan yang dapat direkam dari kalangan pengusaha dan LSM tentang hal ini yaitu antara lain:

- Pelayanan Para pelaku ekonomi menilai bahwa penerbitan perda pungutan adalah hal yang tidak patut, karena kebijakan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, bukan membebani mereka. Pemda seharusnya lebih memikirkan pengembangan iklim usaha yang menarik bagi investasi, bukan membuat suram dunia usaha. Namun demikian, beberapa pengusaha menyatakan tidak menolak membayar pungutan asalkan caranya tidak seperti mau “mencuri uang dari rakyat”.
- Mekanisme pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik belum memberi ruang memadai bagi munculnya aspirasi masyarakat. Pemda dan DPRD masih bersikap sentralistis dan otoriter terhadap masyarakat. Ketika sebuah LSM merancang raperda tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA), Pemda dan DPRD “melecehkannya” dengan alasan “Tidak ada aturannya LSM bisa mengajukan raperda”.
- Walaupun dalam menyusun raperda, pemda sudah berkonsultasi para ahli di perguruan tinggi dan aktivis LSM. Namun, setelah disampaikan ke DPRD upaya mengangkat aspirasi masyarakat itu terputus. DPRD hanya melaksanakan mekanisme formalnya sesuai dengan tata tertib sidang dan menyatakan mereka sudah mewakili rakyat. Oleh karena itu, beberapa aktivis LSM mengusulkan adanya konsultasi publik pada setiap proses pengambilan keputusan, terutama yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

8. Keluhan Pengusaha: Usahanya Mulai Berjalan Normal Tetapi Terancam Dengan Adanya Berbagai Pungutan

Pengusaha di Sulawesi Utara:

1. Perdagangan Cengkeh

Pada tahun 2001 harga cengkeh mencapai Rp70.000/kg. Biaya proses pemetikan sampai pengeringan sebesar Rp20.000/kg. Karena itu, nilai bersih penerimaan petani mencapai Rp50.000/kg. Pasar cengkeh pasca pembubaran BPPC sudah bebas dari kendala tataniaga, petani bebas menentukan kapan dan kepada siapa mereka akan menjual cengkehnya. Pasar digerakkan oleh agen pabrik rokok dari Jawa. Para pedagang pengumpul menjual cengkehnya ke pedagang besar kemudian pedagang besar tersebut menjualnya ke perwakilan pabrik rokok yang ada di Manado. Non-agen pabrik rokok tertentu, juga ikut membeli cengkeh untuk dijual ke pabrik-pabrik rokok kecil di Surabaya. Saluran pembelian adalah petani — pedagang pengumpul — pedagang besar — agen pabrik rokok (seperti Gudang Garam, Dji Sam Su, Bentoel, dan Djarum).

Dengan adanya otonomi, pengusaha rokok akan dibebankan berbagai pungutan melalui jalur perizinan dan distribusi. Bentuk perizinan dan retribusi yang harus dibayar oleh pedagang besar cengkeh di Manado antara lain: a) izin fiskal; b) retribusi sampah; c) pajak reklame (kalau ada); d) pengawasan alat pemadam kebakaran (kalau ada); e) perpanjangan izin usaha setiap lima tahun (salah seorang pedagang untuk memperpanjang izin dipungut Rp800.000); dan f) perpanjangan izin tempat usaha, lima tahun sekali.

2. Nelayan dan Pengusaha Perikanan

- a. Usaha penangkapan ikan laut yang beroperasi di wilayah perairan Sulut umumnya dilakukan oleh nelayan kecil dan atau anak buah kapal yang sangat tergantung pada pemilik modal/kapal. Ikan yang ditangkap umumnya jenis Tuna dan Layang. Sebagian besar hasil tangkapan dijual ke pengusaha *cold storage*/eksportir yang jumlahnya cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi. Komposisi hasil tangkapan nelayan rata-rata adalah 20% kualitas tinggi, 50% kualitas sedang, dan 30% kualitas rendah.

Pemda mengenakan retribusi terhadap pelelangan ikan yang besarnya ditetapkan 5% dari nilai transaksi. Pungutan tersebut ditanggung bersama oleh nelayan dan pedagang, masing-masing 2,5%. Kalau pembelian tidak melalui pelelangan, maka retribusi semuanya ditanggung oleh pedagang atau eksportir yang dibayarkan langsung ke kas daerah. Perda tentang retribusi pelelangan ikan yang berlaku pemda tidak pernah disosialisasikan kepada nelayan dan pedagang.

- b. Selain ikan, sebagian nelayan juga mengusahakan budidaya rumput laut, yang hasilnya dijual kepada eksportir yang berdomisili di Manado. Nelayan mendapatkan modal dari pengusaha/eksportir melalui pola kemitraan. Seorang eksportir bisa bermitra dengan sekitar 3.000 nelayan dengan total produksi 150 ton rumput laut kering per bulan.

Seperti halnya dengan pedagang ikan, pengusaha rumput laut juga diwajibkan membayar berbagai macam retribusi, antara lain; (a) diwajibkan membayar retribusi sebesar 2,5% dari

nilai transaksi; (b) harus membayar biaya pengujian sertifikat mutu sebesar Rp 100.000 /sertifikat; (c) harus membayar biaya pengurusan SIUP yang berlaku 5 tahunan sebesar Rp1.100.000. Selain itu, para nelayan rumput laut, walaupun selama ini sudah menjadi bagian dari perusahaan induk yang telah membayar dan memperoleh izin usaha, tetapi tetap menjadi target pungutan oleh pemda.

- c. Perum Perikani (BUMN) bergerak di bidang usaha pembekuan ikan (terutama ikan cakalang dan layang), baik untuk mensuplai industri pengalengan lokal maupun untuk ekspor terutama ke Bangkok. Saat ini bahan baku ikan sepenuhnya dibeli dari nelayan melalui para pedagang pengumpul. Kapasitas produksi total yang dimiliki 600 ton, namun untuk saat ini produksinya hanya 30 ton/hari, karena hasil tangkapan ikan sedang kurang. Perikani menampung sekitar 10% dari total produksi ikan di Sulut. Perusahaan sejenis yang beroperasi di Sulut jumlahnya cukup banyak, sehingga harga terbentuk dalam suasana yang cukup bersaing.

Dengan adanya otda pengusaha perikanan mulai merasakan adanya tekanan, yaitu dengan munculnya rencana pemberlakuan berbagai regulasi. Surat izin penangkapan ikan diberlakukan di setiap daerah kabupaten/kota yang memiliki wilayah perairan laut. Kalau semua regulasi daerah itu efektif berlaku, maka pengusaha diwajibkan membayar retribusi dan akan disibukkan dengan urusan perizinan di setiap daerah operasinya. Semua itu pada gilirannya melahirkan ekonomi biaya tinggi.

3. Perdagangan Ternak Besar

Kabupaten Gorontalo memiliki empat pasar ternak, salah satunya adalah Pasar Ternak Pulubala di Kecamatan Tibawa. Semuanya dikelola oleh Dinas Pasar. Kegiatan transaksi berlangsung seminggu sekali bersamaan dengan penyelenggaraan pasar mingguan yang menjual segala kebutuhan masyarakat. Jumlah ternak yang ditransaksikan dipasar Pupubala adalah sekitar 12-30 ekor sapi/hari pasar.

Terhadap ternak yang ditransaksikan dikenai retribusi pasar sebesar Rp10.000/ekor (Perda No. 7, 1999). Pembayar retribusi tergantung kesepakatan, namun umumnya menjadi tanggung jawab pemilik atau penjual ternak. Hasil pungutan tersebut dialokasikan 5% untuk upah petugas pemungut, 57% untuk pemda, dan 38% untuk kas desa.

Kalau ternak di bawa keluar daerah, maka pedagang dikenakan retribusi sebesar Rp50.000/ekor. Beberapa orang sopir truk pengangkut ternak mengemukakan bahwa dalam prakteknya, pungutan diberlakukan juga terhadap ternak yang bukan ditujukan untuk diperdagangkan ke luar daerah. Ternak yang dibeli petani untuk tujuan dipelihara juga kena retribusi Rp50.000/ekor. Pemungutannya dilakukan di pos pemeriksaan terpadu (yang melibatkan petugas dari Dinas Peternakan, Dispenda, Dinas Perhubungan, dan Polisi) yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Boalemo – Kabupaten Gorontalo.

4. Pengusaha Kehutanan

Gorontalo termasuk produsen utama rotan di Wilayah Indonesia Timur, oleh karena itu banyak berdiri perusahaan pengolahan/penggorengan rotan. Sebagian besar bahan mentah rotan berasal dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolmong. Kabupaten Gorontalo

merupakan salah satu pemasok bahan baku rotan bagi pembuat dan eksportir meubel rotan di Pulau Jawa.

Pengusaha rotan menilai bahwa dengan otonomi iklim usaha menjadi tidak jelas. Di satu sisi ada perbaikan dalam pelayanan perizinan, dalam pengertian pengurusannya lebih lancar dan sederhana. Tetapi di pihak lain, pungutan makin tinggi karena banyak bentuk pungutan dan dilakukan di beberapa tempat.

Pungutan yang dibebankan kepada pengusaha rotan diatur dalam Perda No. 12, 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan yang besarnya Rp15.000/ton. Walaupun nilai pungutan tidak terlalu besar, tetapi cukup meresahkan karena cara pemda memberlakukan perda tersebut. Pemda tidak melakukan sosialisasi, tetapi langsung memberitahukan bahwa ada retribusi dan diberlakukan surut empat bulan ke belakang (diberitahukan pada April 2001 pungutannya dihitung sejak Januari 2001). Sewaktu menghadap bupati untuk melakukan protes, bupati malah mengancam bahwa “kalau tidak setuju izinnnya akan dicabut”. Bupati beralasan bahwa, “daerah membutuhkan dana untuk membangun dan pengusaha harus ikut berpartisipasi”.

Selain itu, pemda juga membentuk sebanyak lima pos pungutan di jalur yang dilalui angkutan rotan untuk memungut dari pedagang pengumpul sebesar Rp15.000/truk. Petugas pos juga akan mengenakan denda terhadap angkutan rotan yang beratnya melebihi izin yang diberikan. Besarnya denda tidak tentu, tergantung kesepakatan antara petugas dan pedagang.

5. Pengusaha Konstruksi

Meskipun sumbangan pihak ketiga terhadap pengusaha konstruksi di Kabupaten Gorontalo masih diberlakukan, tetapi jumlahnya sudah jauh berkurang dibanding sebelum era reformasi. Pada tahun 2000 total sumbangan dari Gapensi sebesar Rp300 juta, sewaktu Gapensi banyak mengerjakan proyek pemda, total sumbangan pernah mencapai Rp1,4 miliar. Demikian pula potongan terhadap nilai proyek yang diterima pengusaha cenderung berkurang. Keadaan ini terjadi berkat mulai berkembangnya pengawasan terhadap pemda baik oleh dewan maupun masyarakat. Sebelumnya pungutan tidak resmi yang dilakukan pihak pemda bisa mencapai 10-12%, sekarang hanya 7% dari nilai proyek.

Masalah yang masih mengangal adalah masih tetap berlangsungnya KKN dalam mekanisme pelayanan publik. Beberapa indikasi yang dapat dikemukakan antara lain adalah:

- Informasi tentang biaya memperoleh izin usaha konsultan berbeda dari satu pejabat/petugas ke petugas lainnya. Perbedaan angka biayanya sangat signifikan. Petugas ke-1 menyebut biaya sebesar Rp700 ribu, petugas ke-2 menyebut angka Rp400 ribu, dan petugas kelainnya mengatakan Rp200 ribu.
- Surat izin usaha yang sama masih harus diurus di dua tingkat, baik di propinsi maupun di kabupaten/kota. Pada pengurusan izin ini, selain menyita banyak waktu biasanya diikuti dengan pungutan informal.
- Proses tender proyek pemda pasca otonomi daerah, sejak TA 2000 dinilai berlangsung lebih buruk, karena paket proyek yang akan ditenderkan sudah diarahkan kepada pengusaha tertentu.

Pengusaha di Jawa Barat:

1. Pengusaha perkebunan

GPP (Gabungan Pengusaha Perkebunan) menyurat kepada Gubernur Jabar melalui surat No. 238/GPP/IX/2001, tanggal 4 September 2001 yang melaporkan bahwa akhir-akhir ini banyak diterbitkan perda pungutan yang dikeluarkan oleh pemda kabupaten, pemda kota, dan juga pemerintah desa. Pungutan-pungutan tersebut sangat memberatkan karena hanya menambah biaya produksi tanpa meningkatkan nilai tambahnya. Beberapa perda yang dinilai GPP memberatkan sektor perkebunan adalah:

- a. Perda tentang pajak pemanfaatan ABT dan APT. Dalam UU No. 34, 2000 dinyatakan bahwa pajak ini merupakan pajak propinsi. Tetapi beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Garut membuat perda sendiri, dan memungut sendiri pajaknya. Selain karena tumpang-tindih, masing-masing kabupaten menerapkan tarif yang berbeda. Contohnya, Kabupaten Bandung menerapkan tarif Rp350/m³ air yang dipakai, dan Kabupaten Sukabumi Rp189/m³, tetapi Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur masing-masing menerapkan tariff Rp1.250 dan Rp7.500 per hektar kebun.
- b. Perda retribusi tentang rencana pengarahannya lokasi atas perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Lebak. Menurut GPP retribusi jenis ini hanya diperlukan bagi proyek baru yang memerlukan pengarahannya lokasi baru, sehingga tidak tepat jika dikenakan pada permohonan perpanjangan HGU Perkebunan.
- c. Perda retribusi terhadap produksi pertanian dan perkebunan. Perda ini ditemui di Kabupaten Cianjur yang memungut retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat dengan tarif Rp15/kg. Kabupaten Tasikmalaya sedang menyusun perda tentang retribusi terhadap semua produksi perkebunan dengan tarif sekitar Rp5 per kg produksi. Kabupaten Sukabumi telah mengeluarkan Perda tentang retribusi pemeriksaan produksi pertanian, dan di Desa Cicadas. Kabupaten Subang, memungut retribusi sebesar Rp2/kg pucuk teh dari petani.

2. Pengusaha Meubel Rotan

Bahan baku: Pengusaha kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon mengeluh karena mulai mengalami hambatan pengadaan bahan baku. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya izin untuk mengekspor rotan mentah, akibatnya daerah penghasil rotan seperti Sulawesi dan Kalimantan lebih memilih untuk mengekspor produknya daripada memasarkannya di dalam negeri. Ini suatu dilemma. Tetapi sebaiknya otonomi daerah tidak diartikan secara sempit bahwa setiap kegiatan harus berorientasi pada kepentingan daerah, tetapi sebaliknya semua itu tetap harus diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional. Setiap daerah seharusnya tidak membuat “pagar”. Otonomi daerah harus diarahkan agar terjalin kerjasama antar daerah, antar kabupaten/kota, juga antar propinsi, bukan menciptakan kondisi agar terjadi isolasi dan pengkotakan yang dapat menurunkan efisiensi nasional.

Pungutan: jumlah beban pungutan berupa SPK yang ditarik langsung dari pengusaha rotan adalah Rp10.000 per peti kemas. Pungutan ini dulu pernah dicabut, tetapi karena adanya otonomi mulai Januari 2001 diberlakukan kembali. Pungutan SPK dibayarkan melalui Dinas Perindag pada waktu eksportir mengurus *Certificate of Origin (CO)*. Dalam hal ini hanya

eksportir rotan yang mengurus CO di Cirebon yang terkena peraturan ini, sementara eksportir yang mengurus CO di Jakarta (sekitar 10 – 20%) tidak dikenakan pungutan. Selain SPK, pungutan lain yang dikenakan kepada pengusaha rotan (berlaku juga untuk pengusaha komoditi lainnya) meliputi pajak APT/ABT (pajak air), retribusi penghijauan, dan uang pas di pelabuhan.

3. Komoditi Susu Sapi

Aktivitas ekonomi lainnya yang cukup penting di Kabupaten Garut adalah peternakan sapi perah. Salah satu KUD di Kecamatan Cisurupan mempunyai anggota peternak sebanyak 1.800 orang dengan populasi sapi perah sebanyak 6.000 ekor. Tingkat produksi susu mencapai 14.000 liter per hari. Susu yang ditampung atau dibeli KUD dikirim ke PT. Indomilk dan PT. Susu Bendera. Persoalan yang dihadapi KUD adalah pungutan liar yang dilakukan oleh preman. Demi kelancaran pengiriman, KUD harus membayar kepada preman sebesar Rp200.000/bulan.

Kegiatan ekonomi rakyat yang cukup berkembang tersebut dipandang oleh Pemda Garut sebagai potensi untuk meningkatkan perolehan PAD. Untuk itu, semua susu produksi peternak dikenakan retribusi Rp4 per liter. Semula pemda menetapkan tarif Rp6 per liter, namun karena adanya keberatan dari para peternak maka dalam rapat penentuan tarif yang melibatkan pemda, dewan, dan KUD akhirnya disepakati tarif retribusi susu Rp4 per liter.

9. Banyak Prosedur Perijinan Yang Sangat Rumit Sehingga Menciptakan Peluang Terjadinya Pungli

Kasus yang terjadi di Kabupaten Garut bisa menjadi contoh timbulnya masalah ini. SK bupati No.9, 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik mensyaratkan bahwa setiap orang/badan yang akan melakukan penebangan pohon, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan melampirkan: (1) photo copy KTP pemohon; (2) tanda bukti lunas PBB; (3) surat keterangan kepemilikan tanah dan pohon yang akan ditebang pada lahan milik dari kepala desa/kelurahan setempat; (4) tanda bukti pembelian dari pemilik pohon apabila pohon tersebut dijual kepada pihak lain; (5) surat pernyataan diatas kertas segel bermaterai mengenai kesanggupan untuk menyediakan bibit dan menanam kembali pohon di areal bekas penebangan; (6) daftar klem pohon; (7) peta lokasi tebang; dan (8) jenis kayu, jumlah pohon dan target tebang.

Untuk memperoleh izin penebangan kayu tertentu yang jenisnya sama dengan jenis tanaman Perum Perhutani, seperti jati, mahoni, pinus, damar, sonokeling, akasia, dan rasamala perlu terlebih dulu harus dibentuk tim komisi. Susunan tim ini terdiri dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Petugas Teknis pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat, dan Petugas Perhutani setempat. Tim ini selanjutnya melaksanakan pemeriksaan di lapangan. Selain itu, agar pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil penebangan itu sah, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dengan melampirkan: (1) photo copy surat izin tebang; (2) bukti pembayaran retribusi izin tebang kayu; (3) jenis kendaraan yang akan digunakan untuk

mengangkut kayu; (4) laporan realisasi penebangan/laporan hasil produksi; dan (5) laporan kayu yang diangkut.

Tim komisi tersebut dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan diketahui oleh Asisten Perhutani/KBKPH setempat, Camat, dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek-tingkat kecamatan). Retribusi ini dikenakan kepada siapa saja orang/badan di Kabupaten Garut yang akan melakukan penebangan pohon di lahan miliknya dengan jumlah pohon lebih dari 10 batang. Tujuan perda perijinan ini baik, yaitu untuk melakukan pengawasan pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan rehabilitasi untuk pemulihan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial lahan. Tetapi, rumitnya prosedur perijinan yang menyertai retribusi ini cenderung membuat sulit pelaksanaannya. Masyarakat yang masih memiliki pohon kayu umumnya adalah mereka yang tinggal di pedesaan yang jauh dari kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Penyediaan berbagai surat keterangan yang harus mereka penuhi sebelum mengajukan permohonan tebang cenderung akan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Karena itu, prosedur yang rumit ini telah menciptakan peluang pungli, yang tentu saja selain menambah biaya, juga mengabaikan aspek pengawasan yang menjadi tujuan perda tersebut.

Jenis retribusi semacam itu banyak terjadi di era sebelum UU No. 18, 1997. Pada periode tersebut banyak retribusi yang dipungut tidak disertai dengan jasa pelayanannya, dan menjadi seperti “pajak”. Beberapa contoh retribusi seperti ini adalah retribusi kartu ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, pemeriksaan susu perah, dsb. Pada akhirnya retribusi jenis ini menyebabkan maraknya pungli. Pemda bahkan harus mengeluarkan biaya pungut lebih besar daripada hasil pungut yang diterimanya.

10. Semakin Maraknya Jenis Pungutan Berantai di Jalur Utama Transportasi Barang dari Sentra Produksi ke Lokasi Pasar

Kasus di Sumatera Utara

Pengalaman Seorang Sopir Truk Angkutan Buah-buahan dari Karo ke Jakarta

Seorang sopir truk yang mengangkut jeruk dari Karo menuju Jakarta mengemukakan bahwa sepanjang perjalanan terdapat sedikitnya 16 pos jembatan timbang dan beberapa tempat pemungutan retribusi yang harus dilalui. Tabel berikut memberikan informasi tentang jumlah dan besarnya “denda” yang harus dibayar di setiap jembatan timbang dan di pelabuhan penyeberangan Bakauheuni.

Jembatan Timbang

PROPINSI	Jumlah	Besar Denda	Keterangan
1. Sumatra Utara	4 pos	Rp.5.000 – 10.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Per ton kelebihan muatan
2. Riau	2 pos	Langsung bayar sebesar Rp.60.000 baik muatan lebih atau tidak	Denda dibayarkan baik ada kelebihan muatan ataupun tidak. Selain pembayaran denda juga dikenakan Retribusi Jalan sebesar -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
3. Jambi	2 pos	Langsung bayar Rp.60.000 baik muatan lebih atau tidak	Selain pembayaran denda juga dikenakan Retribusi Jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
4. Sumatra Selatan	5 pos	Denda Rp.15.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Selain kemungkinan pembayaran denda juga dikenakan Retribusi Jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)
5. Lampung	3 pos	Denda Rp.15.000 untuk setiap ton kelebihan muatan	Selain kemungkinan pembayaran denda juga dikenakan Retribusi Jalan -Rp. 2.500 (truk ukuran 6 ton) -Rp. 3.500 (truk ukuran 8 ton)

Pungutan Resmi dan Tidak Resmi di Pelabuhan Bakauheuni

Jenis Pungutan	Besar Denda	Keterangan
-Uang cap -Uang palang -Preman	Rp.3.000 Rp.3.000 Rp.2.000	Pungutan liar di pelabuhan penyeberangan Bakauheuni
-Prioritas untuk keberangkatan penyeberangan	Rp.15.000	Dibayar jika ingin mendapat prioritas naik ke kapal jika terjadi antrian panjang truk yang akan menyeberang
-Karantina	Rp.1.000	Pungutan resmi pos karantina Gayam
-Retribusi hasil pertanian	Rp.7.000	Pungutan resmi dikenakan untuk setiap truk angkutan

- Perkiraan jumlah pungutan (resmi dan tidak resmi) untuk pengangkutan jeruk dari Karo ke Jakarta berkisar antara Rp.268.500 hingga Rp.1.008.500. Pungutan terendah terjadi jika truk angkutan benar-benar mengangkut sesuai kapasitas. Namun demikian, truk jarang mengangkut sesuai kapasitasnya. Di samping itu, indikasi kecurangan juga terjadi di jembatan timbang. Sopir truk mengatakan mereka selalu harus membayar denda, terlepas dari muatannya berlebih atau tidak.
- Perhitungan nilai penjualan jeruk untuk 1 truk ukuran 8 ton (memuat $\pm$ 120 keranjang @ 65 kg dikalikan harga rata-rata jeruk kelas A, B, C dan D (di tingkat petani) sekitar Rp.1.800 = Rp.14.400.000).
- Dengan demikian persentase (total) biaya pungutan terhadap nilai muatan satu truk berkisar antara 2% hingga 7%.

Kasus di Sulut

Beberapa Bentuk Pungutan yang Harus Dibayar Di Sepanjang Jalan Antara Gorontalo dan Manado

Pemeriksaan muatan dan pungutan resmi di jalan dilakukan oleh tim gabungan Dipenda, DLLAJ, dan Polisi. Pungutan resmi didasarkan pada perda yang sudah diterbitkan oleh Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Minahasa.

Beberapa pungutan resmi dan tidak resmi yang dibayar sopir truk dan pengusaha dalam perjalanan antara Gorontalo dan Manado adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan surat izin mengangkut ikan Rp3.500/izin, sementara untuk hewan besar (sapi) pedagang harus membayar izin keluar sebesar Rp50.000/ekor.
2. Terdapat 3 jembatan Timbang (satu di Gorontalo, dan dua di Minahasa). Kendaraan/truk dengan kapasitas muatan 5 ton dipungut Rp3.000 (muatan lebih atau tidak), dan untuk kendaraan/truk dengan kapasitas muatan besar (8-10 ton) dipungut Rp 5.000 (muatan lebih atau tidak).
3. Retribusi terminal yang populer disebut fiskal daerah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Gorontalo. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus Rp100.000/tahun atau Rp75.000/enam bulan.
4. Retribusi jalan sebesar Rp1.000 atau Rp2.000 di setiap pos penjagaan. Antara Gorontalo dan Manado terdapat 5 buah pos penjagaan (pos ditempatkan di setiap kecamatan yang dilewati).

III. KESIMPULAN

1. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat lokal agar bisa lebih cepat, lebih efisien, dan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Namun, dalam melaksanakan pelayanan, pemda mengembangkan organisasi birokrasinya sehingga membutuhkan dana yang besar. Akibatnya DAU yang diterima dari pusat hampir semuanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Dengan alasan tersebut, pemda berusaha semaksimal mungkin mencari sumber dana lain terutama dari PAD.

3. Selain lebih leluasa dalam menggunakannya, PAD juga dianggap sebagai salah satu indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Karena merupakan indikator kemampuan berotonomi, maka baik daerah yang mendapat DAU besar maupun yang memperoleh DAU kecil, sama-sama berusaha keras untuk meningkatkan PADnya. Setiap dinas yang terbentuk diharuskan memberikan kontribusi PAD dan besarnya PAD yang berhasil dikumpulkan dijadikan sebagai indikator utama untuk menentukan tingginya kinerja suatu dinas.
4. Jenis-jenis pungutan yang pernah dilarang karena terbukti menciptakan distorsi dalam kegiatan produksi dan kegiatan distribusi barang didalam negeri, kembali menjadi pungutan andalan bagi pemda di era otonomi.
5. Para pengusaha di daerah melihat hal ini sebagai suatu beban bagi dunia usaha. Prosedur memperoleh izin dan persyaratannya memerlukan biaya dan menghabiskan waktu. sehingga menambah biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Ini pada akhirnya akan menghambat upaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi nasional.
6. Masyarakat menjadi semakin prihatin karena: a) meningkatnya jenis dan jumlah pungutan yang dibebankan pada kegiatan ekonomi penduduk tidak dimbangi oleh usaha pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan; b) saluran aspirasi masyarakat untuk melakukan koreksi tidak lagi efektif karena lembaga perwakilan rakyat (DPRD) justru memiliki kepentingan yang tinggi terhadap PAD karena honor dan gajinya tergantung pada besarnya PAD.
7. Koordinasi antara pemda propinsi dan pemda kabupaten menjadi sangat lemah dan malah dalam beberapa kasus terjadi konflik kepentingan terhadap sumber-sumber PAD yang potensial. Selain itu, pembuatan peraturan oleh satu kabupaten atau kota cenderung tidak mempedulikan akibatnya terhadap kabupaten atau kota lain. Akibatnya, objek yang sama dapat dikenakan pungutan baik oleh perda propinsi maupun oleh beberapa pemda kabupaten.
9. Pemda nampaknya menyadari bahwa pembayaran retribusi berarti pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu ketika pemda tidak dapat menyediakan pelayanan yang dimaksud, maka pemda mencoba menciptakan pungutan dalam bentuk pajak karena pajak tidak terkait langsung dengan pelayanan.
8. Selain dalam bentuk pungutan, beberapa pemda juga sudah mulai melakukan pengaturan yang sifatnya non-tarif barriers. Ini dilakukan oleh pemda antara lain karena mendapatkan tekanan dari beberapa pengusaha lokal yang menginginkan adanya perlakuan khusus dari pemerintahan otonomi.

DAFTAR BACAAN

1. Center for Policy and Implementation Studies (CPIS), "Hasil Kajian tentang Pungutan Daerah." Jakarta, September 1996.
2. Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU), "Deregulasi Perdagangan Regional dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah, Kasus Riau dan Sumatera Utara. Jakarta, Agustus 1999.
3. -----, "Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh." Jakarta, Desember 1999.
4. SMERU Research Institute, April 2001, Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Sumatera Utara, Jakarta.
5. -----, Juni 2001, Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Sulawesi Utara dan Gorontalo, Jakarta.
6. -----, Februari 2002, Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat, Jakarta.
7. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah."
8. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah."
9. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah."
10. Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah."